



PEMERINTAH



MEDIA



DUNIA PENDIDIKAN



KOMPONEN MASYARAKAT



DUNIA USAHA



IMPLEMENTASI BELA NEGARA

MODUL

II

Desain Sampul: Ryan



MODUL II

IMPLEMENTASI BELA NEGARA

TIM PENYUSUN MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal Wantannas
Letjen TNI Doni Monardo
2. Ketua Satgas Bela Negara : Mayjen TNI Toto Siswanto S.I.P., M.M.
3. Wakil Ketua Satgas Bela Negara : Irjen Pol Drs. Sukma Edi Mulyono M.H.
4. Pengarah :
 - a. Mayjen TNI Aris Martono Haryadi
 - b. Laksda TNI Teguh Prihantono S.Sos.
 - c. Marsda TNI Emir Panji Dermawan S.Sos.
5. Koordinator Tim : Mayjen TNI Moh Hatta Usmar Rukka
6. Wakil Koordinator Tim : Brigjen TNI Made Datrawan S.I.P.
7. Sekretaris Tim : Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus M.Sc.
8. Anggota Tim :
 - a. Kolonel Inf Joko Setyo Putro
 - b. Kolonel Arh M. Hasyim Lalhakim S.E., M.M., M.Sc.
 - c. Kombes Pol Yulias S.I.K.
 - d. Kolonel Sus Drs. Sutarno M.Si.
 - e. Kolonel Tek B.D.O. Siagian S.E., M.Si (Han).
 - f. Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto M.Pd.
 - g. Kolonel Pom Djati Santoso S.H., M.H.
 - h. Maulana S.H., M.H.
 - i. Hulman Napitupulu S.H.
 - j. Dr. Abdul Rokhman A.Pi., M.M.
 - k. Ir. Muhammad Iqbal M.Sc.
9. Pakar Perumus :
 - a. Prof. Abdorakhman Gintings M.Si., M.Ed., Ph.D.
 - b. Prof. Dr. Idrus Affandi S.H.
 - c. Prof. Dr. Udin S. Winataputra M.Ed.
 - d. Prof. Dr. Karim Suryadi M.Si
 - e. Prof. Dr. Cecep Darmawan S.I.P., M.Si., M.H.
 - f. Prof. Dr. Pudji Muljono M.Si.
 - g. Dr. Ir. Parlaungan Adil Rangkuti M.Si.
 - h. Drs. Firdaus Syam MA., Ph.D.
 - i. Dr. Epin Saepudin M.Pd.
 - j. Dr. Maulia D. Kembara
 - k. Dr. Eki Baihaki M.Si.
 - l. Dr. Ade Iva Murty M.Si.
 - m. Dr. Ir. E. Namaken Sembiring M.Si.
 - n. Dr. Leni Anggraeni M.Pd.
 - o. Drs. Suprpto. M.Ed.
 - p. Haryo B.Rahmadi S.E., M.Si (Han).
 - q. Gery Gugustomo S.IP., M.Si (Han).
 - r. Syaifullah M.Si.
 - s. Ir. Sukarni Abukesah
 - t. Nahum Eka Wanda S.Sos.



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 170 TAHUN 2018**

TENTANG

BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : a. Bahwa Rencana Aksi Nasional Bela Negara sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 2018, dilaksanakan dengan berpedoman kepada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
b. Bahwa untuk itu, perlu disusun dan ditetapkan Modul Utama Pembinaan Bela Negara;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 - 2019;

MEMUTUSKAN :

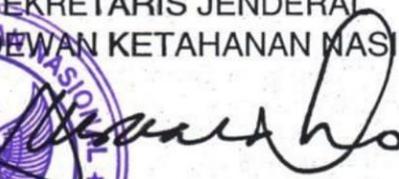
Menetapkan : BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA.

KESATU : Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara terdiri dari:
A. Modul I Konsepsi Bela Negara,
B. Modul II Implementasi Bela Negara

- KEDUA : Buku Modul Utama tersebut adalah satu rangkaian yang saling terkait, dengan materi bersifat umum yang wajib disampaikan kepada peserta dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan aksi gerakan bela negara.
- KETIGA : Buku Modul Utama ini merupakan referensi utama bagi seluruh Kementerian dan Lembaga dalam menyusun Modul Khusus sesuai tugas, fungsi dan kekhasan masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



DONI MONARDO
LEWAN JENDERAL TNI





KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya.



Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Hampir 2 (dua) dekade bangsa kita menapaki abad ke-21, yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi canggih dan pergeseran-pergeseran lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman nonmiliter. Mencermati hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif.

Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang terdiri dari Modul I Konsepsi Bela Negara dan Modul II Implementasi Bela Negara. Modul Utama tersebut dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyelenggara perlu menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut

menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan demikian, Aksi Nasional Bela Negara tidak hanya dilaksanakan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, tetapi juga menjangkau sampai pada tataran aksi gerakan implementatif yang menjadi program kerja di seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara memiliki ruang lingkup yang holistik dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan negara, guna mengantisipasi ancaman multidimensional yang meliputi bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Militer.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Kementerian, Lembaga, para akademisi, dunia usaha, komponen masyarakat, media, dan personel Setjen Wantannas yang tergabung di dalam Tim Penyusun Modul, serta semua pihak yang mendukung dirampungkannya Modul Utama Pembinaan Bela Negara ini. Saya harapkan buku Modul Utama ini juga memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membina dan mewujudkan kesadaran, semangat serta kemampuan bela negara dalam rangka membangun Ketahanan Nasional.

Aksi Nasional Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Terima Kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Salam Damai Sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om

Salam Bela Negara

Jakarta, 7 Desember 2018

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



BONE MONARDO
LEMBAGA JENDERAL



ABSTRAKSI

Modul Implementasi sebagai bagian kedua dari Modul Utama ini disusun dengan pertimbangan mendasar bahwa sistematika konsep-konsep yang melatari Nilai-Nilai Dasar Bela Negara bukanlah hal yang cukup mudah untuk dipahami, meskipun Modul Utama I Konsepsi Bela Negara sudah diupayakan semengalir dan ringkas mungkin. Langkah selanjutnya yaitu menjembatani sistematika konsep Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dengan amanat regulasi juga tidaklah terlalu sederhana. Tidak banyak yang memiliki cukup keluangan untuk memahami gambaran besar dari sebuah produk regulasi, terutama jika dilengkapi berlembar-lembar lampiran seperti Inpres No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Secara umum, Modul II Implementasi Bela Negara ini berisikan prinsip pokok penerapan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, serta panduan-panduan untuk mengejawantahkannya dalam program-program aplikatif berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman faktual maupun potensial di tiap-tiap gatra Wawasan Nusantara.

Adapun tujuan spesifik yang akan dicapai dengan adanya Modul Implementasi ini adalah: 1) membantu pengguna Modul Utama I (Modul Konsepsi) untuk menerjemahkan esensi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara ke dalam penyusunan Modul Khusus dan bentuk-bentuk aksi bela negara dengan rumusan sederhana yang aplikatif serta mudah dipahami, dan; 2) menjaga kesesuaian antara aksi yang akan dibuat dengan substansi Modul Konsepsi dan pola umum Inpres No. 7 Tahun 2018. Kesemuanya akan diwujudkan dengan menyajikan:

1. Penjelasan teknis tentang pendefinisian Bela Negara secara yuridis, Bela Negara sebagai Kesadaran dalam Menghadapi Segala Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), Penggenapan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, dan Definisi Aksi Nasional Bela Negara;
2. Penegasan hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menyusun Modul Khusus maupun program aksi, yang meliputi ulasan singkat mengenai sifat-sifat dari Modul Utama, pokok-pokok amanat yuridis yang perlu diperhatikan dalam menyusun Modul Khusus maupun program aksi, penjelasan tentang model *Pentahelix* sebagai kerangka pelibatan segenap elemen masyarakat dalam Aksi Nasional Bela Negara, dan ilustrasi mengenai penyusunan rumusan program

aksi yang sederhana dan efektif, keseimbangan substansi dan kemasan terkait dengan generasi milenial, kelompok difabel, revolusi industri 4.0, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*), serta contoh untuk menghindari reduplikasi dan tumpang tindih program;

3. Penjelasan mengenai persepsi ancaman faktual dan potensial pada tiap-tiap gatra Wawasan Nusantara yang terbagi lagi menjadi ancaman militer dan non-militer, dilengkapi dengan penjelasan awal mengenai klasifikasi AGHT, serta;
4. Contoh-contoh aksi aplikatif sesuai Inpres No. 7 Tahun 2018 yang diharapkan mewakili dinamika perkembangan lingkungan strategis untuk menjadi gambaran bagi K/L dan Pemda dalam merumuskan Program Aksi Nasional Bela Negara sesuai tugas serta fungsi masing-masing.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. DEFINISI BELA NEGARA DAN AKSI NASIONAL BELA NEGARA.....	1
A. DEFINISI BELA NEGARA	1
B. BELA NEGARA SEBAGAI KESADARAN MENGHADAPI SEGALA AGHT ..	1
C. PENGGENAPAN NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA	3
D. DEFINISI AKSI NASIONAL BELA NEGARA	4
II. POKOK-POKOK PENYUSUNAN MODUL KHUSUS DAN PROGRAM AKSI	5
A. SIFAT MODUL UTAMA	5
B. AMANAT YURIDIS	6
C. MODEL <i>PENTAHHELIX</i>	7
D. KESEDERHANAAN RUMUSAN DAN EFEKTIFITAS AKSI	9
E. KESEIMBANGAN SUBSTANSI DAN KEMASAN.....	10
F. MENGHINDARI REDUPLIKASI DAN TUMPANG TINDIH PROGRAM.....	17
III. PERSEPSI ANCAMAN FAKTUAL DAN POTENSIAL	17
A. KLASIFIKASI AGHT	18
B. ANCAMAN NON-MILITER	18
1. Bidang Demografi	18
2. Bidang Geografi	18
3. Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup.....	19
4. Bidang Ideologi	19
5. Bidang Politik	19
6. Bidang Ekonomi	20
7. Bidang Sosial Budaya dan Teknologi.....	20
C. ANCAMAN MILITER	20
IV. CONTOH PROGRAM AKSI NASIONAL BELA NEGARA	22
V. PENUTUP	47

I. DEFINISI BELA NEGARA DAN AKSI NASIONAL BELA NEGARA

Dalam bagian ini akan dipaparkan penjelasan teknis tentang pendefinisian Bela Negara secara yuridis, Bela Negara sebagai Kesadaran dalam Menghadapi Segala Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), Penggenapan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, dan Definisi Aksi Nasional Bela Negara.

A. DEFINISI BELA NEGARA

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara” adalah *“sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara”*. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Oleh karena itu, secara definisi Bela Negara sendiri sebenarnya merupakan:

1. **Jiwa** kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. **Kewajiban** dasar manusia; dan
3. **Kehormatan** bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara”.

B. BELA NEGARA SEBAGAI KESADARAN MENGHADAPI SEGALA AGHT

Amanat Tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara 2015, 19 Desember 2015 menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri

tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri dan elemen rakyat yang lain. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, gelombang perdagangan bebas dan tekanan integrasi ekonomi regional, hingga penguasaan akses sumber daya maritim, energi dan pangan, serta tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan.

Inpres No. 7 Tahun 2018, selaras dengan Amanat Tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara tersebut, menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan keamanan hingga sosial budaya. Adapun tujuan dari penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan Upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan masif. Ditegaskan dalam Inpres tersebut, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018, dengan demikian merupakan penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara bangsa. Selain itu, kehadiran Inpres No. 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa Bela Negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini sangat selaras dengan amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, nampak bahwa Inpres No. 7 Tahun 2018 menggenapi pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa dan negara yaitu hak untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya dimaknai dalam bidang pertahanan keamanan, wilayah, dan politik, namun juga di segenap bidang kehidupan nasional, mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga IPTEK. Secara hakiki, dengan demikian **Bela Negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT)** yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara” atau yang oleh Inpres No. 7 Tahun 2018 dipertegas sebagai “Aksi Nasional Bela Negara”.

C. PENGGENAPAN NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

Mengacu kepada kerangka berpikir Visi Kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur, maka Aksi Nasional Bela Negara mengamanatkan adanya kesadaran akan anugerah kemerdekaan. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari kekuasaan senjata dan politik bangsa lain, namun juga harus dimaknai sebagai tekad untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri menuju kemakmuran dan keadilan. Aksi Nasional Bela Negara juga mengamanatkan keharusan bersatu dalam wadah Bangsa dan Negara Indonesia sebagai prasyarat bela negara yang tidak bisa ditolak.

Pada intinya, kemerdekaan dan persatuan adalah asumsi dasar yang tidak boleh dipertanyakan lagi dalam konteks bela negara. Sementara yang masih menjadi tugas jangka panjang adalah kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan. Kegagalan menegakkan kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan dipastikan akan menghancurkan dasar kemerdekaan dan persatuan yang telah dimiliki negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu, **diperlukan adanya “Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur”**

sebagai penggenap dan penegas bagi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga, NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA secara utuh terdiri dari:

1. Kecintaan kepada Tanah Air;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara;
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara;
5. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik;
6. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur

D. DEFINISI AKSI NASIONAL BELA NEGARA

Dengan mengacu kepada segenap pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selain sebagai perwujudan kesadaran (jiwa, kewajiban, dan kehormatan Bangsa dan Warga Negara Indonesia), Aksi Nasional Bela Negara memiliki elemen-elemen pemaknaan yang mencakup: 1) rangkaian upaya-upaya bela negara; 2) guna menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan; 3) dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, 4) yang diselenggarakan secara selaras, mantap, sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan massif; 5) dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha; 6) di segenap aspek kehidupan nasional; 7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 8) serta didasari oleh Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai penggenap Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, 9) yang dilandasi oleh keinsafan akan anugerah kemerdekaan, dan; 10) keharusan bersatu dalam wadah Bangsa dan Negara Indonesia, serta; 11) tekad untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri.

Mengalir dari segenap pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai sebuah prasaran yuridis dalam susunan yang lebih ringkas, Aksi Nasional Bela Negara dapat didefinisikan sebagai **sinergi perwujudan kesadaran segenap elemen masyarakat, bangsa, dan negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan**

tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

II. POKOK-POKOK PENYUSUNAN MODUL KHUSUS DAN PROGRAM AKSI

Bagian ini berisikan penegasan mengenai hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menyusun Modul Khusus maupun program aksi. Adapun pembahasan akan diawali dengan mengulas kembali secara singkat mengenai sifat-sifat dari Modul Utama. Kemudian akan dijelaskan secara singkat mengenai pokok-pokok amanat yuridis yang perlu diperhatikan dalam menyusun Modul Khusus maupun program aksi, dan dilanjutkan kepada penjelasan tentang model *Pentahelix* sebagai kerangka pelibatan segenap elemen masyarakat dalam Aksi Nasional Bela Negara. Selanjutnya, akan disertakan ilustrasi mengenai penyusunan rumusan program aksi yang sederhana dan efektif serta keseimbangan antara substansi dan kemasan, dan terakhir tentang prasaran untuk menghindari reduplikasi program dan aksi.

A. SIFAT MODUL UTAMA

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Modul Utama I (Modul Konsepsi), bahwa dalam melaksanakan program pembinaan Luar Bela negara yang terstandarisasi, **Modul Utama ini merupakan satu rangkaian yang saling terkait, dengan materi bersifat umum yang wajib disampaikan kepada peserta dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara** dalam rangka pembangunan kesadaran bela negara. Dari segi substansi, Modul Utama merupakan modul sinergi yang bermuatan irisan materi lintas sektoral/disiplin dan berlaku sebagai referensi utama dan pertama bagi K/L dan Pemda dalam menyusun Modul Khusus. Modul Khusus merupakan penajaman daya implementasi Modul Utama I (Modul Konsepsi). Oleh karena itu, Modul II Implementasi Bela Negara hadir sebagai panduan dalam menjembatani Modul I Konsepsi Bela Negara bagi K/L dan Pemda guna menyusun Modul Khusus dan program aksi sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing K/L, dan bagi Pemda sesuai kekhasan daerah masing-masing.

B. AMANAT YURIDIS

Inpres No. 7 tahun 2018 **mengamanatkan setiap K/L dan Pemda untuk melaksanakan program-program Aksi Nasional Bela Negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat.** Selain merujuk kepada amanat Bela Negara dalam UUD NRI 1945 yaitu pada BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk di dalam Pasal 27 Ayat (3), serta Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sifat aplikatif ini merujuk kepada daya implementasi program Aksi Nasional Bela Negara **agar dapat memenuhi amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 9 Ayat (2) huruf d UU No. 3 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan antara lain melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Hal ini menegaskan bahwa bela negara tidak hanya diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sebagai prajurit semata. Maka sejatinya, kata "melalui" dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengabdian sesuai dengan profesi pun merupakan saluran keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

Dalam konteks generasi muda yang saat ini menjadi elemen dominan kependudukan negara kita, Pasal 8 Ayat (7) huruf a UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahkan mengamanatkan Bela Negara sebagai bentuk Pelayanan Kepemudaan. Adapun bentuk pelayanan kepemudaan yang lain dalam Pasal 8 tersebut yaitu kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki, dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh wadah berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi bagi pemuda adalah Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka secara yuridis pernah diamanatkan sebagai salah satu tahap awal Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Hal tersebut dahulu diatur melalui UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Saat ini Gerakan Pramuka diatur melalui UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Di dalam UU tersebut diamanatkan bahwa Nilai kepramukaan mencakup kecintaan pada tanah air dan bangsa, sementara itu rela menolong dan tabah menjadi salah satu Dasa Darma Pramuka. Dinyatakan pula dalam bagian penjelasan bahwa UU tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Kesemuanya jelas merupakan bagian pokok dari Nilai-Nilai Dasar Bela Negara yang menunjukkan relevansi Gerakan Pramuka dengan Aksi Nasional Bela Negara.

C. MODEL *PENTAHHELIX*

Secara ideal, segenap segmentasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 7 tahun 2018 dapat mengikuti **model *Pentahelix* yang melibatkan elemen *Government (G)*, *Academics (A)*, *Business (B)*, *Community (C)*, dan *Media (M)*** atau disingkat **GABCM** yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai **Pemerintah, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha, Komponen Masyarakat, dan Media**.¹

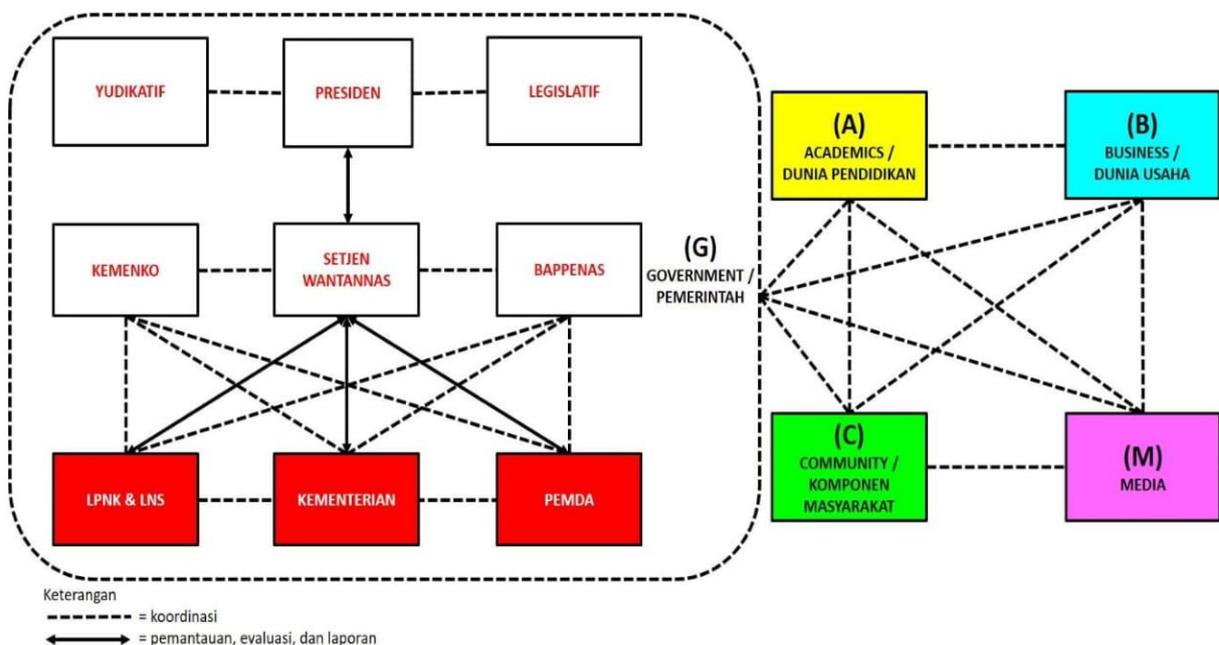
Dalam Aksi Nasional Bela Negara, elemen Pemerintah (G) terdiri dari K/L dan Pemda. Elemen Dunia Pendidikan (A) berasal dari kalangan akademik seperti sekolah, perguruan tinggi, dan Lembaga penelitian. Elemen Dunia Usaha (B) terdiri dari aneka bentuk badan usaha. Elemen Komponen Masyarakat (C) mewakili wadah kemasyarakatan seperti Organisasi Massa (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta tokoh-tokoh masyarakat sendiri baik formal maupun informal dari kalangan agama hingga pemuda. Elemen media (M) dewasa ini tidak hanya diwakili oleh media cetak dan elektronik seperti koran, majalah, televisi, dan radio, namun juga melibatkan media daring/*online*, media

¹ Dewan Ketahanan Nasional, 2018; *Sinergitas Antar Lembaga Merupakan Solusi Bagi Peningkatan Ketahanan Nasional* (Materi Paparan Sesjen Dewan Ketahanan Nasional di Kemendagri tanggal 17 Oktober 2018), Jakarta

warga seperti *blog* dan *YouTube*, serta media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*.

Harapan dari penggunaan model *Pentahelix* ini adalah terbangun sebuah **sinergi yang utuh antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*)** atau dalam bahasa yang lebih sederhana, Johann Georg Ritter von Zimmermann (1728-1795), seorang filsuf dari Swiss, menyampaikan bahwa **“*hunger is the mother of impatience and anger*”** yang berarti "Lapar adalah ibu dari ketidaksabaran dan kemarahan". Adapun sasaran pokoknya adalah mengantisipasi dan mengatasi perubahan **spektrum ancaman nyata dan potensial yang sangat multidimensi dan saling terkait**.

Visualisasi Sinergi *Pentahelix* dalam Aksi Nasional Bela Negara



Penggunaan model *Pentahelix* ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan segenap Bangsa dan warga negara melalui Aksi Nasional Bela Negara. Dalam praktiknya hal ini merupakan *smart power* sebagai perwujudan aksi Bela Negara yang berbasis antropologi budaya dan kearifan lokal melalui penerapan *skill*, *strategy*, *system*, dan *structure* dalam mencapai *target* yaitu kemakmuran rakyat. Demikian pula kebutuhan sumber daya dari Aksi Nasional Bela Negara dapat dipenuhi secara gotong royong oleh segenap masyarakat Indonesia yang kesemuanya mendapatkan peran dalam Aksi Nasional Bela Negara.

D. KESEDERHANAAN RUMUSAN DAN EFEKTIFITAS AKSI

Terdapat beragam rumusan yang dapat dijadikan contoh program aksi Bela Negara yang telah dilakukan pemerintah maupun anggota masyarakat sebagai berikut; Kemenkopolhukam antara lain menekankan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan para pemimpin di setiap strata kehidupan, Kemendagri mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi serta mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal, Ada pula yang berupaya untuk menjadikan wawasan kebangsaan sebagai cara berpikir dalam menghadapi berbagai masalah bangsa, serta mengaktualisasikan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan pada setiap tahap dan tingkat penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, rumusan-rumusan di atas masih juga kerap dianggap terlalu konseptual dan cukup sulit dicerna oleh masyarakat luas sehingga diperlukan contoh yang lebih aplikatif dan membumi. Sebagai ilustrasi, dapat diangkat sebuah contoh tentang aksi bela negara untuk memperkuat ketahanan pangan. Untuk tujuan tersebut, sagu sebagai contoh makanan pokok di Papua dapat menjadi pelengkap makanan pokok bagi masyarakat di luar Papua sehingga mengurangi ketergantungan terhadap beras secara nasional. Selain itu, program ini pun dapat makin meningkatkan keeratan hubungan antar sesama warga Bangsa Indonesia melalui pengenalan khazanah tataboganya. Program aksi dalam contoh di atas dapat dirumuskan secara sederhana misalkan sebagai **“Peningkatan Produksi Sagu sebagai Makanan Pokok Alternatif”**. Adapun penggunaan rumusan seperti **“mendorong intensifikasi produksi varietas pangan pokok lokal guna mendukung diversifikasi pangan nasional”**, **sebaiknya dihindari meskipun tidak salah secara konseptual**. Bahkan dalam penerapan aksi di lapangan, bila perlu dapat dirumuskan semacam slogan yang lebih sederhana dan memikat seperti **“Sagu untuk Bangsa”**.

E. KESEIMBANGAN SUBSTANSI DAN KEMASAN

Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa kepada generasi muda merupakan tugas yang harus diemban oleh segenap elemen Bangsa Indonesia selama-lamanya. Di dalam tugas tersebut terdapat kewajiban untuk menyeimbangkan antara keaslian nilai dan substansi dengan kemasan yang dapat diterima oleh target audiensi yang beragam sesuai perkembangan jaman. Namun secara umum, memaksakan pola dogmatis dan doktriner atas nama kesakralan nilai hanya akan menuai hasil yang kontra-produktif. Sebaliknya mengikuti selera jaman tanpa pertimbangan yang matang dipastikan akan menghancurkan esensi Nilai-Nilai Luhur Bangsa itu sendiri.

Hal ini juga penting bagi komponen masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, sebagai contoh kelompok difabel, agar beragam kelebihan mereka tetap dapat memberikan sumbangsih bagi Aksi Nasional Bela Negara. Secara harfiah, difabel adalah kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris '*different ability*' atau '*differently able*' yang merujuk kepada orang yang berkemampuan berbeda dari orang 'normal' pada umumnya. Istilah ini digunakan untuk merubah pola pikir masyarakat umum terhadap para penyandang cacat, yang selama ini dianggap memiliki banyak kekurangan/kelemahan. Pada kenyataannya, banyak dari kalangan difabel ini yang memiliki kemampuan, keahlian, semangat, motivasi, kreatifitas dan inovasi yang luar biasa di berbagai bidang dan kerap melebihi kemampuan orang-orang yang disebut 'normal'. Salah satu ciri utama kelompok difabel yang dapat disinergikan dalam Aksi Nasional Bela Negara adalah semangat juang pantang menyerah yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat luas.

Fenomena lain, dominannya generasi muda dalam komposisi kependudukan negara kita dikenal sebagai kondisi Bonus Demografi, yaitu ketika jumlah penduduk dengan usia produktif melebihi jumlah penduduk dengan usia ketergantungan (anak dan lanjut usia). Periode bonus demografi Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2045 ketika Indonesia memasuki era Indonesia Emas. Periode tersebut dengan demikian merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan lebih banyaknya

jumlah penduduk usia produktif daripada jumlah penduduk pada usia ketergantungan. Namun di sisi lain, bonus demografi dapat menjadi musibah demografi ketika penduduk usia produktif ini tidak berkepribadian baik, serta tidak mendapatkan saluran eksistensi, ekspresi, dan lapangan pekerjaan yang memadai.

Saat ini, diskursus bonus demografi Indonesia perlahan digantikan oleh wacana tentang generasi milenial yang secara substantif memiliki esensi yang sama tentang kondisi kependudukan Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia pada usia produktif ini dikatakan sebagai generasi milenial yang dicirikan antara lain sebagai generasi yang lahir dan besar di tengah penggunaan kecanggihan, kepraktisan, serta kemudahan dari teknologi informasi, komunikasi, dan multimedia.

Generasi milenial setiap hari berhadapan dengan arus informasi dari segala penjuru dunia melalui gawai dan jaringan media sosial. Di satu sisi, hal ini membuat mereka tidak canggung dan lebih egaliter dalam berdiskusi untuk mengetahui banyak hal. Namun di sisi lain, terdapat bahaya yang nyata yaitu kendala teknologi untuk menyaring aspek negatif di internet, mulai dari bahasa yang kurang patut, manipulasi akun, pornografi, ujaran kebencian, berita bohong (*hoax*), hingga muatan adu domba bernuansa SARA yang digunakan untuk tujuan negatif. Terkait segenap permasalahan tersebut, sebenarnya ada lagi tantangan yang jauh lebih besar yaitu terbukanya era Revolusi Industri 4.0 yang akan menghapuskan ratusan ribu tugas, fungsi, dan pekerjaan manual dengan mesin dan kecerdasan buatan.

Berdasarkan karakteristik dan tantangan pada generasi milenial inilah, maka implementasi Aksi Nasional Bela Negara senyata-nyatanya perlu memanfaatkan teknologi, khususnya media sosial, sebagai saluran wajib pada segala tataran. Kegemaran generasi muda akan hal-hal yang harus selalu baru, merupakan ciri tak terelakkan akibat derasnya arus informasi melalui media berbasis internet.

Pemanfaatan media sosial dengan demikian tidak hanya memerlukan kreatifitas, namun juga energi dan kecepatan untuk selalu memutakhirkan konten dan merespon interaksi publik. Konten dan muatan yang dikembangkan juga harus terus dikemas secara kekinian, kreatif, dan

atraktif mengantisipasi tren yang sedang berkembang sehingga mengena dan melekat di hati dan alam berpikir generasi muda.

Cara terbaik dalam melakukan hal ini tentunya bukan dengan mengunggah foto seremonial dan komunikasi satu arah dalam akun media sosial. Generasi muda harus menjadi subyek aksi nyata, khususnya yang berpengaruh di media sosial, yang telah lebih dahulu mengikuti proses berdasarkan minat dan kemauan mereka. Hal ini sejalan dengan ciri generasi muda yang lebih mantap menyerap ilmu melalui pengalaman praktis di lapangan daripada pengajaran dalam ruangan dengan sistem kelas. Praktik ini pula yang diharapkan akan menghijrahkan bangsa kita dari konsumen pengguna menjadi produsen dan pengendali teknologi untuk mampu melintasi era Revolusi Industri 4.0.

Penting diperhatikan bahwa kegemaran generasi muda akan hal-hal yang baru terbukti tidak hanya mendorong aktifitas bepergian ke berbagai pelosok Nusantara maupun mancanegara, namun juga mendorong inisiatif penggalan kembali nilai-nilai budaya dan sejarah. Dengan demikian, hobi generasi muda bepergian ke mancanegara sebenarnya berpotensi menjadi modal diplomasi kepentingan nasional bangsa Indonesia sebagai warga dunia (kosmopolitan). Hobi ini juga sekaligus menjadi kekuatan kebhinnekaan bangsa dengan peningkatan interaksi antar sesama warga bangsa melalui perjalanan dan kunjungan wisata antar daerah. Melalui perjalanan-perjalanan mereka, generasi muda mengetahui banyak bangsa lain justru semakin memegang teguh jati diri kebangsaannya di tengah arus teknologi. Demikian pula, dalam menggali nilai-nilai sejarah bangsa yang belum mereka ketahui sebelumnya, generasi muda juga mendapati banyak anak bangsa di daerah yang belum terpengaruh teknologi justru memiliki kearifan dan keunggulan lokal yang lebih selaras dengan alam dan lingkungan hidup.

Hal yang disampaikan di atas sebenarnya merupakan contoh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs berlaku sebagai penyeimbang bagi teknologi disruptif dan kecerdasan buatan yang sangat tergantung peralatan impor dan energi listrik. Dengan SDGs, pembangunan di bidang apapun harus mengutamakan inklusifitas dan bukan efisiensi matematis semata. Pada

gilirannya, kesenjangan apapun yang masih terjadi dalam pembangunan nasional dapat semakin dijumpai. Sebagai contoh menonjol, kesenjangan antara investor pertambangan dan perkebunan dengan masyarakat adat, hingga kesenjangan wilayah seperti antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur dapat semakin terjembatani dengan penerapan SDGs, yang sangat selaras dengan Aksi Nasional Bela Negara.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.



2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.



3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.



4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.



5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.



6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.



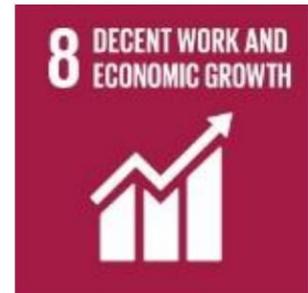
7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.



8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.



9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.



10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.



11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.



12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.



13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.



14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.



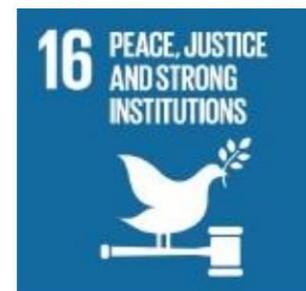
15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.



16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.



17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.



F. MENGHINDARI REDUPLIKASI DAN TUMPANG TINDIH PROGRAM

Kesesuaian tugas pokok dan fungsi K/L serta kekhasan daerah dalam menerjemahkan Aksi Nasional Bela Negara sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai contoh dalam hal ini dapat diilustrasikan pelibatan Kemenag dalam gerakan penghijauan nasional. Peran utama Kemenag dalam hal ini tidak perlu diterjemahkan sebagai pengadaan pohon dan peralatan tanam. Adapun yang terutama dapat dilakukan oleh Kemenag adalah mengembangkan pesan-pesan tentang keselarasan alam dan lingkungan hidup yang harus dimuat dalam program bimbingan keagamaan bagi masyarakat. Pesan-pesan ini kemudian akan diberikan kepada masyarakat melalui wadah-wadah organisasi dan kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat sehingga mendukung gerakan penghijauan nasional.

Perlu diperhatikan bahwa berbagai program aplikatif untuk menerjemahkan Aksi Nasional Bela Negara sesuai Inpres No. 7 Tahun 2018 sebenarnya sudah terdapat di RKA-K/L masing-masing dengan nomenklatur yang mungkin berbeda, namun memiliki esensi yang sama. **Perlu ditekankan bahwa bela negara bukanlah nomenklatur program yang terbatas pada tanggung jawab beberapa instansi/satuan kerja tertentu saja. Sebaliknya, segenap Rencana Kerja Pemerintah K/L dan Pemda sejatinya adalah perwujudan bela negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.** Dengan demikian, K/L dan Pemda cukup meningkatkan sinergi lintas sektoral dan dapat melakukan penyesuaian untuk menghindari terjadinya duplikasi konten/program.

III. PERSEPSI ANCAMAN FAKTUAL DAN POTENSIAL

Pada bagian ini akan diberikan penjelasan mengenai persepsi ancaman faktual dan potensial pada tiap-tiap gatra Wawasan Nusantara yang terbagi lagi menjadi ancaman militer dan non-militer, dilengkapi dengan penjelasan awal mengenai klasifikasi AGHT. Penjelasan mengenai persepsi ancaman diperlukan sebagai landasan penyelarasan arah dan gerak Aksi Nasional Bela Negara di segenap aspek kehidupan nasional. Perlu diperhatikan bahwa perincian persepsi ancaman faktual dan potensial di bawah ini mengacu kepada prioritas yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 2018.

A. KLASIFIKASI AGHT

Sebagaimana telah digariskan dalam pemaknaan Ketahanan nasional di bidang hankam bahwa kondisi daya tangkal bangsa perlu dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat. Adapun kesadaran bela negara tersebut mengandung pula kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Kemudian, menilik pembahasan yang telah dilakukan di bagian awal Modul Implementasi ini, telah diberikan berbagai contoh ancaman dimaksud. Adapun ancaman secara garis besar diklasifikasikan menjadi ancaman faktual dan ancaman potensial. Ancaman faktual adalah eskalasi tertinggi berupa ancaman itu sendiri atau ancaman yang telah mewujudkan secara nyata. Sementara itu, ancaman potensial mengandung eskalasi ancaman pada tingkat yang lebih rendah yang secara berurutan dari eskalasi tertinggi hingga terendah meliputi gangguan, hambatan, dan tantangan. Kesemuanya secara bersama dikenal sebagai AGHT.

B. ANCAMAN NON-MILITER

1. Bidang Demografi

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang demografi adalah kembalinya tendensi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran penduduk yang timpang, termasuk kualitas penduduk terutama dari segi kesehatan yang rentan.

2. Bidang Geografi

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang geografi terutama adalah tingginya tingkat kejadian bencana alam khususnya gempa, gunung meletus, dan tsunami akibat posisi Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik dan rangkaian gunung api aktif. Selain itu posisi silang Indonesia yang strategis di antara dua benua dan samudera juga telah cukup sering memicu potensi konflik dan sengketa perbatasan. Namun demikian, terdapat pula ancaman potensial yang dapat timbul dari kegagalan memanfaatkan peluang

diplomasi dan ekonomi yang bisa diraih dari posisi silang Indonesia yang strategis ini.

3. Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang Sumber Kekayaan Alam (SKA) terutama adalah kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi SKA yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti tidak hanya memicu bencana seperti kekeringan, banjir, dan longsor, namun juga konflik, kemiskinan, dan wabah penyakit. Selain itu, pola penggunaan energi khususnya listrik dan migas yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi.

4. Bidang Ideologi

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang Ideologi terutama adalah penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, liberalisme, radikalisme, separatisme, dan hedonisme. Selain itu telah terjadi pergeseran norma-norma dalam masyarakat yang antara lain berdampak pada menurunnya rasa kebanggaan dan rasa memiliki sebagai bangsa Indonesia.

5. Bidang Politik

Ancaman faktual yang dihadapi di bidang Politik antara lain menguatnya politik identitas, kampanye hitam, nasionalisme sempit, pragmatisme politik, praktik politik uang, politisasi SARA, apatisme politik dan meningkatnya golongan putih (golput). Selain itu juga terdapat potensi gangguan terhadap netralitas aparatur negara khususnya TNI, Polri, dan ASN dalam politik. Pada akhirnya hal tersebut rawan mengakibatkan apatisme dan antipati masyarakat terhadap pembangunan demokrasi. Apabila hal ini dibiarkan berlarut tanpa penerapan hukum yang transparan, dan tanpa penegakan hukum yang tidak tebang pilih, maka cita-cita membangun kehidupan demokrasi yang bersendikan musyawarah mufakat dan gotong royong dapat berbelok kepada munculnya tirani minoritas dan diktator mayoritas.

6. Bidang Ekonomi

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang Ekonomi dapat dikatakan merupakan ancaman yang bertahan lama seperti kemiskinan, lapangan kerja, hingga rendahnya minat kewirausahaan masyarakat. Pada tataran ekonomi makro, ancaman yang dihadapi berupa kebocoran anggaran pembangunan hingga efektifitas dan efisiensi pendapatan dan belanja negara. Pada tataran ini terdapat pula aspek eksternal yang harus dihadapi berupa kerentanan stabilitas moneter akibat spekulasi perdagangan valuta asing.

7. Bidang Sosial Budaya dan Teknologi

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang sosial budaya terutama adalah pelunturan identitas nasional dan semangat kebhinnekaan yang dicerai adanya manipulasi SARA. Hal ini telah banyak menimbulkan konflik komunal/horizontal dan mengorbankan rakyat, khususnya generasi muda yang umumnya mudah terpengaruh karena permasalahan sosial ekonomi. Termasuk di dalam gatra sosial budaya yaitu elemen IPTEK yang menghadapi ancaman faktual berupa penyalahgunaan teknologi informasi untuk berbagai tindak kejahatan/serangan siber, penipuan, penyebaran kabar bohong/provokatif (*hoax*), ujaran kebencian. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia hanyalah pengguna dan konsumen teknologi semata. Sementara, banyak potensi IPTEK anak bangsa yang dapat mencegah ketergantungan dan penguasaan teknologi oleh asing masih luput dari dukungan para pemangku kepentingan.

C. ANCAMAN MILITER

Ancaman faktual yang dihadapi dalam bidang militer atau gatra pertahanan keamanan (hankam) terutama terkait dengan ancaman yang muncul dari bidang lain di luar bidang militer. Ancaman dari bidang lain ini khususnya berupa ancaman faktual berupa konflik dan perkembangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ancaman non-militer

demikian tidak dapat dihadapi dengan kekuatan senjata semata, melainkan harus dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas personel. Namun demikian terdapat pula ancaman faktual yang menonjol lainnya berupa separatisme dan pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI yang kini semakin menuntut daya diplomasi pertahanan Indonesia. Adapun ancaman potensial berupa invasi/agresi militer negara asing tetap merupakan ancaman yang tidak boleh dikesampingkan dalam masa apapun. Ancaman invasi/agresi militer negara asing menuntut kesiapan implementasi Sishankamrata dan Strategi Perang Berlarut untuk menghadapinya.

IV. CONTOH PROGRAM AKSI NASIONAL BELA NEGARA

Matriks di bawah ini berisi contoh-contoh aksi aplikatif sesuai Inpres No. 7 Tahun 2018 yang diharapkan mewakili dinamika perkembangan lingkungan strategis untuk menjadi gambaran bagi K/L dan Pemda dalam merumuskan Program Aksi Nasional Bela Negara sesuai tugas serta fungsi masing-masing.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
DEMOGRAFI							
1	Persebaran Penduduk yang tidak merata.	Ancaman Faktual	Pembangunan sentra-sentra ekonomi dan industri di luar pulau Jawa, khususnya pulau-pulau terdepan, guna membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan penduduk secara alami.	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	PEMERINTAH	Kemenperin	Memperbanyak pengembangan Kawasan Industri khususnya di luar pulau Jawa, yang berorientasi kearifan lokal berdasarkan potensi alam di wilayah.
				KemenKP		Memperbanyak pengembangan SKPT di luar pulau Jawa untuk kepentingan ekspor hasil kelautan dan perikanan.	
				Kemdagri		Berusaha semaksimal mungkin menarik minat pengusaha/investor dalam negeri dan luar negeri untuk mengembangkan usaha di wilayahnya, serta memberikan kebijakan yang afirmatif bagi usaha UMKM untuk mengembangkan gerakan kewirausahaan yang berorientasi kearifan lokal berdasarkan potensi alam di wilayah.	
				Pemda			
				KemendesPDTT		Memperbanyak program transmigrasi yang berorientasi kearifan lokal berdasarkan potensi alam di wilayah transmigrasi tanpa merusak ekosistem yang ada.	
				KemenBUMN		Mendorong BUMN untuk mengembangkan usahanya di luar pulau Jawa, khususnya pulau-pulau terdepan.	
				Kemenaker		Menggiatkan program kewirausahaan di Balai-balai latihan kerja di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.	
				Kementan		Mengembangkan program kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura sesuai kearifan lokal di wilayah.	
				Kemen PUPR		Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra-sentra industri dan ekonomi di luar pulau Jawa.	

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
					Kemendag	Membuka jaringan perdagangan nasional dan internasional melalui jalur diplomatik maupun <i>e-commerce</i> guna mendukung pertumbuhan wirausaha lokal yang berorientasi perdagangan domestik maupun ekspor.	
					Kemenkominfo	Kampanye kearifan lokal dan potensi alam wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha lokal maupun investasi domestik maupun luar negeri.	
					BKPM	Menyederhanakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien terkait perijinan investasi dalam dan luar negeri guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.	
					LIPI	Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah tentang kearifan lokal dan potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem di daerah.	
					DUNIA PENDIDIKAN	Perguruan tinggi	Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma) berwawasan pengembangan sentra industri dan ekonomi di luar pulau Jawa.
						Lembaga penelitian	Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemda tentang kearifan lokal dan potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem di daerah.
					DUNIA USAHA	Kalangan Pelaku Usaha/ Investor/ BUMN/ BUMD/ BUMS	Mengadakan pemenuhan kebutuhan logistik/makanan bagi <i>catering</i> perusahaan, <i>laundry</i> , penyediaan dan pemeliharaan mess/akomodasi dari masyarakat setempat dengan bantuan manajemen dan kendali mutu serta harga yang bersaing secara wajar.
							Mengalokasikan dana CSR dalam rangka pemberdayaan kapabilitas dan kapasitas masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kewirausahaan dan ekonomi mikro yang mendukung aktivitas perusahaan di daerah.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
					KOMPONEN MASYARAKAT	LSM/Ormas	Penyuluhan dan Pendampingan program kewirausahaan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem di daerah.
					KOMPONEN MASYARAKAT	Tokoh-Tokoh masyarakat/agama/adat/pemuda/pelajar/mahasiswa	Mensosialisasikan pentingnya membangun kewirausahaan guna pertumbuhan ekonomi di daerah.
					MEDIA	Media cetak/elektronik/ sosial	Kampanye program kewirausahaan UMKM yang berbasis kearifan lokal dan potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem di daerah, khususnya kepada generasi milenial.
GEOGRAFI							
2	Letak geografis Indonesia di kawasan cincin api Pasifik (berpotensi untuk terjadinya: gempa, tsunami, dan bencana vulkanik)	Ancaman Faktual	Pemantapan kesiagaan dan tanggap bencana melalui geladi kesiapsiagaan mitigasi bencana di setiap kabupaten/kota.	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. BNPB	PEMERINTAH	Kemendagri	Bersama BNPB mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kinerja Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembentukan BPBD serta operasional baik kegiatan sosialisasi, maupun pelatihan sesuai jenis bencana yang ada di wilayahnya serta audit keamanan infrastruktur publik.
					PEMERINTAH	TNI	Melaksanakan tugas perbantuan baik pada kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun penanggulangan bencana.
					PEMERINTAH	Polri	
					PEMERINTAH	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
					PEMERINTAH	BMKG	Meningkatkan kecepatan, akurasi, dan ketepatan distribusi informasi tentang kemungkinan terjadinya bencana baik jenis maupun tempatnya.
					PEMERINTAH	Pemda	Mendorong dan memfasilitasi BPBD dalam penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan penanggulangan bencana mulai tingkat pemukiman, perkantoran sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					DUNIA PENDIDIKAN	Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta penerapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat (Tri Dharma) dalam mengatasi permasalahan koordinasi sektoral, antisipasi preventif, dan kecepatan tanggap bencana secara nasional.
					Lembaga penelitian	Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemda tentang pendayagunaan kearifan lokal dalam mengantisipasi potensi bencana alam.
					DUNIA USAHA	Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis aspirasi masyarakat dan kebutuhan Pemda guna mendukung kegiatan yang berkaitan dengan antisipasi kebencanaan.
					KOMPONEN MASYARAKAT	Berpartisipasi secara proaktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan serta mitigasi bencana.
					MEDIA	Kampanye tentang kesadaran dalam mengantisipasi terjadinya bencana, dan membantu penyiapan jaringan informasi, hotline, kontributor, dan reporter dalam kondisi tanggap darurat.

SUMBER KEKAYAAN ALAM & LINGKUNGAN HIDUP

3	Kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, wabah penyakit, dan kemiskinan	Ancaman Faktual	Gerakan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup pada kawasan gunung, hutan, sumber/mata air, sungai, waduk, danau, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pesisir, dan laut	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Seluruh Kementerian Koordinator	PEMERINTAH	KemenLHK	Pengintegrasian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis ekonomi dan ekologi berkelanjutan (ekonomi hijau).
						KemenKKP	Pemeliharaan daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis partisipasi masyarakat.
						KemenPUPR	Pembangunan infrastruktur sumber daya berwawasan lingkungan mendukung konektivitas, produktivitas, efisiensi, dan pelayanan logistik yang berdaya saing.
						KemenATR/BPN	Pengelolaan sistem penguasaan lahan secara adil dan bebas dari konflik agraria.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					KemenRistekDikti	Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk yang berwawasan lingkungan.
					Kemenkes	Pengawasan lingkungan khususnya tanah dan air untuk kesehatan masyarakat.
					Kemenperin	Pembangunan industri pengolahan ramah lingkungan (industri hijau).
					Kemendag	Peningkatan aksesibilitas pasar dan promosi produk berwawasan lingkungan.
					Kementan	Dukungan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan budidaya pertanian ramah lingkungan.
					KemendesPDTT	Pelatihan dan pendampingan penyelamatan dan pelestarian lingkungan di seluruh desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
					Kominfo	Penyebarluasan informasi kepada segenap lapisan masyarakat terkait dengan penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
					Kemendikbud	Mengedukasikan seluruh tenaga pendidik, peserta didik, dan pemangku kepentingan pendidikan terkait lainnya tentang penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
					LIPI	Pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyelamatan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
					BPPT	Pengkajian dan penerapan teknologi untuk menghasilkan inovasi, audit, kliring, alih, dan layanan teknologi penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
					TNI	Penyelenggaraan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka penyelamatan dan pelestarian lingkungan untuk kedaulatan NKRI serta keselamatan bangsa.
					Polri	Pengamanan dan penertiban kelancaran penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
					Pemda	Penerbitan Perda berwawasan lingkungan.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					DUNIA PENDIDIKAN	Perguruan tinggi Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (tri dharma) berwawasan lingkungan hidup.
						Lembaga penelitian Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemda tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berbasis pelestarian lingkungan hidup.
					DUNIA USAHA	Berbagai Perseroan Terbatas Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis aspirasi masyarakat.
						Perusahaan pertambangan Reklamasi lahan ramah lingkungan.
						Perusahaan pengembang Pemanfaatan tata ruang ramah lingkungan.
						Perusahaan perkayuan Penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan pelestarian lingkungan.
						Pedagang Penyeleksian komoditas pertanian ramah lingkungan.
					KOMPONEN MASYARAKAT	HKTI, Kelompok Tani/nelayan Pelatihan dan pendampingan manajemen teknologi pertanian dan perikanan berbasis lingkungan yang berdaya saing. Penerapan budidaya pertanian ramah lingkungan.
						LSM Pelatihan dan pendampingan penyelamatan dan pelestarian lingkungan
						Ormas/tokoh masyarakat Teladan penyuluhan penyelamatan dan pelestarian lingkungan
						Generasi muda dan komunitas lain (artis, atlet, difabel, dsb.) Penyelamatan dan pelestarian lingkungan sejak dini, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan minat, profesi, dan kemampuan masing-masing.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT		CONTOH KEGIATAN
					MEDIA	Media sosial, elektronik, dan cetak.	Kampanye gerakan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.
IDEOLOGI							
4	Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Terorisme, Radikalisme, Separatisme, dan Komunisme)	Ancaman Faktual	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Seluruh Kementerian Koordinator	PEMERINTAH	Seluruh K/L dan Pemda	Memasukkan muatan nilai ideologi Pancasila secara substantif dan simbolik dalam segenap kegiatan internal K/L serta dalam interaksinya dengan publik baik melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, maupun melalui penyelenggaraan seminar/ ceramah/ diskusi yang disesuaikan dengan program masing-masing K/L dan konteks target audiens.
							Menegaskan kewajiban bagi segenap pejabat dan aparaturnya untuk menjadi contoh teladan perilaku Pancasilais antara lain religius, santun, dan lemah lembut, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai kebhinekaan, mengedepankan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak, serta rela berkorban bagi sesama warga negara Indonesia.
							Mewajibkan pemasangan poster tentang Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Terorisme, Radikalisme, Separatisme, dan Komunisme) di kantor-kantor pelayanan publik dan titik-titik pengumuman yang sering dilalui masyarakat.
					Pemda	Memasukkan muatan nilai ideologi Pancasila secara substantif dan simbolik dalam segenap kegiatan internal Pemda serta dalam interaksinya dengan publik baik melalui pelayanan publik maupun melalui penyelenggaraan seminar/ ceramah/ diskusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta kearifan lokal setempat.	
					DUNIA PENDIDIKAN	Segenap lembaga Pendidikan formal, informal, dan non-formal	Menegaskan kewajiban bagi segenap pengurus, tenaga pendidik, dan peserta didik untuk menjadi contoh teladan perilaku Pancasilais antara lain religius, santun, dan lemah lembut, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai kebhinekaan, mengedepankan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak, serta rela berkorban bagi sesama warga negara Indonesia

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
					Perguruan tinggi	Menetapkan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib.	
					Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Memasukkan contoh-contoh penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila yang aplikatif dan sesuai dengan konteks kekinian dalam segenap proses belajar mengajar kepada pelajar/ mahasiswa.	
					DUNIA USAHA	Menyelenggarakan penguatan ideologi Pancasila bagi seluruh pimpinan dan karyawan melalui ceramah, diskusi, ekskursi, permainan, dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan.	
				Seluruh pelaku usaha		Menjadikan materi Pancasila sebagai materi wajib dalam sistem rekrutmen, evaluasi, dan jenjang karir karyawan.	
						Memasukkan muatan nilai ideologi Pancasila secara substantif dan simbolik dalam segenap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat khususnya yang dibiayai dengan dana CSR.	
					KOMPONEN MASYARAKAT	LSM	Mendukung program penguatan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh pemerintah.
						Ormas	Menegaskan kewajiban bagi segenap anggotanya untuk menjadi contoh teladan perilaku Pancasilais antara lain religius dan bukan fanatik, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai kebhinekaan, mengedepankan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak, serta rela berkorban bagi sesama warga negara Indonesia.
					MEDIA	Media cetak, elektronik (Radio, TV), media sosial	Mewujudkan perilaku insan pers Pancasila dengan pemberitaan yang menjunjung tinggi etika jurnalistik dan nilai-nilai Pancasila secara utuh.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
						Mendukung kampanye Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Terorisme, Radikalisme, Separatisme dan Komunisme) dalam bentuk iklan layanan masyarakat di media cetak, elektronik, serta pesan singkat dan meme melalui akun-akun media sosial.
POLITIK						
5	Penyebaran kampanye hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA	Ancaman Faktual	Sosialisasi gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan politisasi SARA	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan	PEMERINTAH	Kemdagri Mengawasi dan mendorong para Kepala Daerah agar tidak melakukan praktik politik dan birokrasi yang bersifat primordialisme, termasuk politik dinasti melalui sarana yang tersedia serta melakukan penataan politik dan pemerintahan yang benar-benar berorientasi pada obsesi penguatan kedaulatan rakyat di satu pihak, dan penguatan serta efektifitas sistem demokrasi presidensial di lain pihak.
						Kemenkominfo Menyiapkan penyebaran pamflet, brosur, video edukasi, iklan layanan masyarakat di media cetak, media elektronik, <i>videotron</i> , dan media sosial tentang ajakan melaksanakan politik santun, bersih, cerdas, nasionalis religius, dan bertanggung jawab.
						KemenRistekDikti Menyiapkan kajian dan penelitian sistem politik yang memiliki ciri khas Indonesia, yang santun, bersih, bermartabat untuk kemudian dapat dipergunakan sebagai platform perpolitikan nasional.
						Kemendikbud Menyiapkan program khusus bentuk sosialisasi kepada para pemilih pemula kaum milenial agar tidak terjebak dalam praktik politik uang dan politisasi SARA serta kampanye hitam.
						Kemenag Menyiapkan program pembinaan dan fasilitasi terhadap guru-guru agama dan pemuka agama untuk proses penyebarluasan kesadaran politik yang tinggi dan bersifat religius serta bertanggung jawab.
						Kemenpora Menyusun program pendidikan politik bagi generasi muda yang berupa ajakan-ajakan untuk dapat memperkuat dan menjamin keberhasilan pembangunan Negara dimasa depan.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					Pemda	Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu yang berbasis pada kesadaran politik warganegara sebagai upaya membangun sistim politik yang sehat bebas dari politik uang dan kampanye hitam hingga ke tingkat desa/kelurahan dan organisasi kemasyarakatan.
					KemenPAN/RB	Melakukan evaluasi dan menyiapkan program pengawasan tentang netralitas ASN dan TNI/Polri dalam pemilu bekerja sama dengan lembaga penyelenggara Pemilu
					Kejakgung	Menyiapkan program dan langkah-langkah Penegakan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam pemberantasan praktik kampanye hitam, praktik politik uang, politisasi SARA.
					TNI	Menyiapkan dan menyusun program sosialisasi kepada seluruh komponen TNI untuk menjamin netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilu dan mempersiapkan personel dalam membantu aparat penegak hukum dalam proses pelaksanaan pemilu yang damai.
					Polri	Menyiapkan dukungan personil, program, prasarana dan sarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan/ketertiban yang menjamin tercapainya tujuan pemilu bersih, yakni pemimpin dan wakil rakyat yang amanah. Serta melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap tindakan yang mencederainya atau terhadap pelaku kampanye hitam, politik uang dan politisasi SARA.
					DUNIA PENDIDIKAN Perguruan Tinggi Nasional dan Daerah, serta Sekolah Menengah Atas	Secara umum membangun rasa nasionalisme dan cinta Tanah Air di kalangan civitas akademik dan masyarakat sekitar sekolah/kampus.
						Mendukung dan menyiapkan pelaksanaan sosialisasi gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan anti politisasi SARA di lingkungan kampus.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
						Mendukung studi dan melaksanakan penelitian tentang sistem politik yang memiliki karakter Indonesia dan mampu menghasilkan para pemimpin yang ideal.	
					DUNIA USAHA Semua perusahaan baik swasta nasional maupun asing yang berada di wilayah NKRI dan atau pelaku usaha perorangan	Turut mendorong dan mengawasi agar partai politik/peserta pemilu mematuhi segala ketentuan terkait dengan pendanaan Pemilu dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu terjadinya politik uang.	
					KOMPONEN MASYARAKAT Ormas, LSM, aneka komunitas, dan tokoh-tokoh masyarakat	Meningkatkan kerja sama antar elemen masyarakat madani meliputi LSM, ormas berbasis agama maupun nonagama, dan aneka kelompok kepentingan berbasis profesi dan nonprofesi.	
						Menyelaraskan program-program organisasi masing-masing untuk mendukung terlaksananya pemilu yang damai dan kondusif serta turut serta mengawasi pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, bebas dari politik uang dan politisasi SARA, yang dikemas dengan baik dan menarik sehingga mendorong warga masyarakat turut berpartisipasi aktif.	
					MEDIA	Media cetak dan elektronik	Menyiarkan dan memuat iklan layanan masyarakat dengan konten dan kemasan yang mudah dicerna masyarakat umum terkait gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan politisasi SARA.
						Media warga berbasis daring (<i>Blog</i> , dan <i>Vlog</i>)	Mengulas teladan nyata dari masyarakat terkait gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan politisasi SARA dalam bahasa yang mudah dicerna.
						Media sosial	Merancang dan mendistribusikan aneka pesan singkat dan meme kreatif untuk beragam segmen masyarakat tentang gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan politisasi SARA.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
EKONOMI						
6a	Kemiskinan, Sulitnya Lapangan Pekerjaan Dan Rendahnya Minat Kewirausahaan.	Ancaman faktual	Gerakan Kewirausahaan Emas Hijau : a. Pelatihan UMKM budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan dan hortikultura yang bernilai ekonomis dan ekologis yang didukung permodalan KUR dan sistem pemasaran daring. b. Pelatihan UMKM industri turunan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan hortikultura yang didukung permodalan KUR dan sistem pemasaran daring. c. Pengembangan sistem permodalan dan	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	PEMERINTAH	Kementan Mendorong pengembangan kewirausahaan masyarakat lokal dengan menyiapkan regulasi dan infrastruktur di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura yang berorientasi ekspor, yang bersinergi dengan program cetak sawah, intensifikasi hortikultura, diversifikasi pangan, intensifikasi peternakan, dll.
						Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pelatihan dan pendampingan UMKM, Koperasi atau, BUMDES dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat lokal di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.
						Kementerian Perindustrian Mendorong pengembangan hilirisasi industri di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.
						Kementerian Perdagangan Menyiapkan regulasi yang bersifat afirmatif di bidang perpajakan khususnya usaha ekspor pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.
						Kementerian BUMN Mendorong penggunaan program CSR BUMN untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat lokal di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.
						Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dan swasta dalam pengembangan daerah untuk meningkatkan investasi di bidang industri hilir, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat lokal dalam pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.
						Kementerian Desa PDTT Memperbanyak program transmigrasi yang berorientasi kepada pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
			fasilitas kredit UMKM bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan hortikultura. d. Pelatihan pengemasan dan menjaring pasar. e. Pengembangan industri kreatif di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan hortikultura yang terintegrasi dengan industri pariwisata.		Kemen LHK	Melaksanakan program pelatihan dan pendampingan UMKM budidaya tanaman keras yang bernilai ekologis dan ekonomis bagi masyarakat di daerah pegunungan, bantaran sungai dan pesisir, yang bersinergi dengan program reforestasi dan perhutanan rakyat, serta bekerja sama dengan instansi, lembaga dan swasta terkait dalam program revitalisasi DAS.
					Kementerian Pariwisata	Mengembangkan program wisata ekologi yang berbasis masyarakat bidang pertanian, perkebunan dan hortikultura dan kehutanan.
					Kemen ATR/BPN	Meminimalkan potensi konflik pemanfaatan lahan guna mendukung gerakan kewirausahaan emas hijau.
					Kementerian Tenaga Kerja	Menggiatkan program kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan di BLK di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dan swasta.
					Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mengampanyekan kearifan lokal dan potensi alam wilayah khususnya di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha, serta peningkatan investasi domestik maupun luar negeri di daerah. Selain itu mendorong pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memajukan sektor industri pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
					Kemen PUPR	Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan swasta terkait dalam penyiapan infrastruktur DAS, bendungan, embung, saluran irigasi primer dalam rangka pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
					Badan Ekonomi Kreatif	Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait serta swasta untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan pada sektor ekonomi kreatif.
					TNI	Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait serta swasta untuk mempercepat dan mengefektifkan pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
					Polri	Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait serta swasta untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang mengganggu/menghambat pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.	
					DUNIA PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi	Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma) berwawasan pengembangan sentra industri dan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
						Sekolah Menengah Kejuruan	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
						Lembaga penelitian	Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemda tentang pengembangan sentra industri dan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
						Perusahaan swasta multinasional dan nasional	Melaksanakan program CSR yang mendukung pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
					DUNIA USAHA	Perusahaan IT perangkat keras dan lunak termasuk penyedia (provider) jaringan telekomunikasi	Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memajukan sektor industri pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
						Perusahaan perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>).	Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemasaran hasil hilirisasi industri pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
					KOMPONEN MASYARAKAT	LSM/Ormas	Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan swasta terkait dalam penyuluhan dan pendampingan program kewirausahaan emas biru yang berbasis kearifan lokal dan pelestarian lingkungan hidup.
						Pramuka/pecinta alam/organisasi kepemudaan	Berpartisipasi dalam mendukung program kewirausahaan emas biru yang berbasis kearifan lokal dan pelestarian lingkungan hidup.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
			kehutanan yang terintegrasi dengan industri pariwisata.		Kementerian Desa PDTT	Memperbanyak program transmigrasi yang berorientasi kepada pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.	
					Kementerian Tenaga Kerja	Menggiatkan program kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan di BLK di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dan swasta.	
					Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mengampanyekan kearifan lokal dan potensi alam wilayah khususnya di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan yang dapat mendorong pertumbuhan wirausaha, serta peningkatan investasi domestik maupun luar negeri di daerah. Selain itu mendorong pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memajukan sektor industri pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.	
					Badan Ekonomi Kreatif	Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait serta swasta untuk mendorong pengembangan hilirisasi industri di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan pada sektor ekonomi kreatif.	
					Kementerian Pariwisata	Mengembangkan program wisata ekologi yang berbasis masyarakat pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.	
					DUNIA PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi	Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma) berwawasan pengembangan sentra industri dan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
						Sekolah Menengah Kejuruan	Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
					Lembaga penelitian	Melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemda tentang pengembangan sentra industri dan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.	
					DUNIA USAHA	Perusahaan swasta multinasional dan nasional.	Melaksanakan program CSR yang mendukung pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.
				Perusahaan IT perangkat keras dan lunak termasuk penyedia (provider) jaringan telekomunikasi.		Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memajukan sektor industri pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan.	
				Perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce).		Bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemasaran hasil hilirisasi industri pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan baik untuk pasar domestik maupun ekspor.	
					KOMPONEN MASYARAKAT	LSM/Ormas.	Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan swasta terkait dalam penyuluhan dan pendampingan program kewirausahaan emas biru yang berbasiskan kearifan lokal dan pelestarian lingkungan hidup.
				Pramuka/pecinta alam/organisasi kepemudaan		Berpartisipasi dalam mendukung program kewirausahaan emas biru yang berbasiskan kearifan lokal dan pelestarian lingkungan hidup.	
				Lembaga keagamaan		Mensosialisasikan program kewirausahaan emas biru melalui pendekatan keagamaan.	
				Komunitas masyarakat difabel		Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan swasta terkait dalam pelatihan kewirausahaan emas biru bagi masyarakat difabel.	
					MEDIA	Media cetak, elektronik dan sosial	Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan swasta terkait dalam mengampanyekan gerakan kewirausahaan emas biru.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
SOSIAL BUDAYA						
7	Konflik komunal/ horizontal/ SARA	Ancaman Faktual	Program pengembangan interaksi sosial masyarakat sebagai jembatan kerekatan sosial antarwarga lintas kampung/ etnis/ agama melalui kerja bakti pembersihan/ perbaikan/ pembangunan drainase lingkungan, tempat ibadah, sekolah, dan rumah tidak layak huni.	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan	PEMERINTAH	Kemdagri Mengarahkan program Kesbangpol pada daerah-daerah yang menjadi prioritas pengembangan interaksi sosial masyarakat serta memastikan dukungan Pemda dengan segenap SKPD untuk kelancaran pelaksanaannya.
				Kemhan Mengerahkan kader-kader bela negara di provinsi tempat pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial untuk menjadi duta dan teladan kerekatan sosial antar etnis/agama.		
				Kemenkumham Memasukkan materi kerekatan sosial dalam program pembinaan kesadaran hukum dan disiplin nasional di daerah-daerah yang menjadi tempat pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial		
				Kemensos Mengarahkan program bantuan sosial dan renovasi rumah tidak layak huni yang telah didata dan diprioritaskan di daerah-daerah pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial.		
				Kemenag Memasukkan materi kerekatan sosial dalam program pembinaan keagamaan di daerah-daerah yang menjadi tempat pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial sebagai <i>pilot project</i> .		
				KemenRistekDikti Mengarahkan kegiatan KKN perguruan tinggi yang ada di daerah tempat pelaksanaan program dan sekitarnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung yang dapat meningkatkan interaksi dan kerekatan sosial masyarakat.		
				Kemendikbud Mengarahkan perbaikan sarana pada sekolah-sekolah yang telah diprioritaskan sebagai sasaran program secara sinergis dengan kebijakan pemda kabupaten/kota.		

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					Kemenpora	Mendayagunakan segenap organisasi kepemudaan khususnya anggota gerakan pramuka di wilayah pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti dan renovasi.
						Membina klub-klub suporter olahraga untuk menjadi duta dan teladan kerekatan sosial antar etnis/agama.
					TNI	Menynergikan area pelaksanaan program TMMD dan komsos kreatif dengan pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial agar dapat saling mendukung tanpa menimbulkan penumpukan kegiatan di satu wilayah.
					Polri	Melaksanakan rangkaian program pembinaan kamtibmas dengan fokus pada kerekatan sosial di segenap kepolisian sektor yang ada di daerah pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial.
					BIN	Mendukung kondusifitas dan pengamanan pada masa persiapan, pelaksanaan, dan monitoring efektifitas program pengembangan interaksi sosial di berbagai daerah.
					BNPT	Mendukung pengamanan dan strategi implementasi di wilayah yang terindikasi rawan terorisme.
					Pemda	Berkoordinasi dengan segenap K/L terkait dalam pengerahan sumber daya daerah dan penentuan prioritas pada wilayah yang secara fisik dan sosial paling membutuhkan renovasi fasum dan fasos.
					DUNIA PENDIDIKAN Perguruan Tinggi	Menyelenggarakan seminar dan diskusi publik dengan tema kerekatan sosial ditinjau dari berbagai disiplin ilmu.
					Lembaga penelitian	Menyelenggarakan seminar dan diskusi publik dengan tema kerekatan sosial ditinjau dari konteks spesifik daerah dengan menghadirkan tokoh-tokoh setempat di berbagai bidang..

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT		CONTOH KEGIATAN
					DUNIA USAHA	Beragam Perseroan Terbatas	Mengarahkan dana CSR untuk mendukung kegiatan-kegiatan produktif yang dapat melibatkan banyak anggota masyarakat di sekitar wilayah operasional, wilayah bahan baku, dan wilayah pemasaran mereka.
					KOMPONEN MASYARAKAT	Beragam komunitas hobi	Ikut mendukung peningkatan kerekatan sosial dengan menyelenggarakan acara kopi darat dan pameran terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau program pengembangan interaksi sosial.
					MEDIA	Media cetak dan elektronik lokal, media warga berbasis daring	Meliput dan memberitakan pelaksanaan program pengembangan interaksi sosial dari berbagai sisi seperti kesibukan di lapangan, hasil renovasi, antusiasme warga, dampak positif yang dirasakan, figur-figur menonjol, komitmen K/L dan pemda, hingga harapan dan kelanjutan program.
IPTEK							
8	Kejahatan/ Serangan Siber	Ancaman Faktual	Mengampanyekan keamanan informasi dan transaksi elektronik melalui seminar, ceramah, pelatihan, dan/atau kegiatan sejenis.	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika	PEMERINTAH	Kemenkeu	Menyelenggarakan pameran dan penyuluhan keamanan informasi dan transaksi elektronik terutama di daerah-daerah yang terindikasi marak dan rawan penipuan keuangan melalui media elektronik.
						Kemhan	Melaksanakan seminar public di perguruan-perguruan tinggi daerah dengan tema ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional dan daerah di era digital.
						Kemenag	Berkoordinasi dengan organisasi keagamaan di daerah untuk mengampanyekan tips keamanan informasi dan transaksi elektronik secara sederhana melalui kegiatan agama sehari-hari terutama yang diikuti oleh kaum Ibu seperti pengajian, kebaktian, dan lain sebagainya.
						Kemdagri	Mewajibkan Pemda beserta segenap SKPD untuk memasang infografis tentang tips keamanan informasi dan transaksi elektronik secara sederhana di kantor-kantor pelayanan publik dan titik-titik pengumuman yang sering dilalui masyarakat.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN	
					Polri	Mengerahkan jajaran polsek dan bhabin-kamtibmas untuk mengadakan penyuluhan tentang aneka modus kejahatan terkait informasi dan transaksi elektronik.	
					TNI	Menyelenggarakan edukasi khusus bagi jajaran Koramil dan Babinsa untuk dapat membantu masyarakat dalam mempraktikkan tips keamanan informasi dan transaksi elektronik khususnya di pedesaan dan daerah-daerah yang rawan penipuan.	
					BSSN	Menyiapkan dukungan materi pokok, personel, dan standar yang akan digunakan oleh segenap K/L dalam mengampanyekan keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan tugas masing-masing K/L serta memperhatikan segmen dan tataran sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang menjadi target audiens.	
					Pemda	Mengevaluasi kepatuhan prosedur dan infrastruktur keamanan informasi dan transaksi elektronik yang diterapkan dengan standar pengendalian sandi yang ditentukan oleh BSSN terutama pada bagian-bagian yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas anggaran serta layanan publik.	
					DUNIA PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi,	Menyiapkan dukungan materi seminar, penelitian, SDM, dan operasional yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan kampanye keamanan informasi dan transaksi elektronik oleh berbagai K/L.
						Lembaga Pelatihan TIK	
					DUNIA USAHA	Koperasi	Mendukung produksi dan distribusi materi infografis serta penyuluhan keamanan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh K/L dan Pemda di wilayah kerja masing-masing baik melalui pemanfaatan CSR maupun program lainnya.
						Bank, BPR, BMT	
						Pegadaian, Leasing dan Lembaga Pembiayaan	
						Asuransi	

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					KOMPONEN MASYARAKAT Asosiasi Profesi, Serikat Pekerja Komunitas yang banyak diminati masyarakat Tokoh masyarakat, daerah, pemuda, agama, selebritis	Menjadi salah satu ujung tombak distribusi materi infografis dan perpanjangan tangan K/L dan Pemda dalam penyuluhan keamanan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Menjadi duta iklan dan kampanye keamanan informasi dan transaksi elektronik.
					MEDIA Media cetak dan elektronik Media warga berbasis daring (<i>Blog</i> , dan <i>Vlog</i>) Media sosial	Menyiarkan dan memuat iklan layanan masyarakat dengan konten dan kemasan yang mudah dicerna masyarakat umum terkait keamanan informasi dan transaksi elektronik Mengulas pengalaman nyata serta solusi praktis dari masyarakat terkait keamanan informasi dan transaksi elektronik dalam bahasa yang mudah dicerna. Merancang dan mendistribusikan aneka pesan singkat dan meme kreatif terkait keamanan informasi dan transaksi elektronik untuk beragam segmen masyarakat.
PERTAHANAN KEAMANAN						
PERTAHANAN NEGARA						
9a	Invasi/agresi dan kampanye militer negara asing	Tantangan (Ancaman Potensial)	Pemantapan Kesiapan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan	PEMERINTAH Kemhan Mabes TNI dan Angkatan Kemhan KKIP Kemen BUMN	Menyiapkan strategi raya dan doktrin turunan perang berlarut/gerilya terkait dengan penyiapan komponen utama, cadangan, dan pendukung pertahanan negara. Memutakhirkan <i>Minimum Essential Force</i> dengan memprioritaskan produk industri strategis nasional. Melanjutkan proses pembentukan <i>cluster</i> industri strategis nasional atau <i>National Defence and Hightech Industries</i> (NDHI).

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					TNI AU	Bekerja sama dengan industri nasional meningkatkan keandalan dan spesifikasi teknis alutsista produksi dalam negeri untuk kebutuhan TNI AU.
					TNI AL	Bekerja sama dengan industri nasional meningkatkan keandalan dan spesifikasi teknis alutsista produksi dalam negeri untuk kebutuhan TNI AL.
					TNI AD	Bekerja sama dengan industri nasional meningkatkan keandalan dan spesifikasi teknis alutsista produksi dalam negeri untuk kebutuhan TNI AD.
					DUNIA PENDIDIKAN Perguruan tinggi nasional dan daerah, sekolah vokasi (SMK dan Diploma)	Kerjasama pendidikan, pengembangan keterampilan rekayasa, litbang, dan manajemen daya saing industri strategis dan industri pertahanan nasional.
					DUNIA USAHA BUMN	Meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi produk pada segmen senjata laras pendek, laras panjang, dan munisi, serta peningkatan kapasitas produksi pesawat udara dan kapal laut.
					BUMS	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi platform, suku cadang, bahan pendukung, dan bahan baku alutsista dengan spesifikasi militer, serta mengembangkan inovasi produk alutsista untuk meningkatkan substitusi impor.
					KOMPONEN MASYARAKAT Forum pemerhati dan peminat dunia kemiliteran dan alutsista	Mengadakan aneka <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai perbandingan teknis dan spesifikasi Alutsista produksi dalam negeri dengan produk luar negeri sebagai sumbang saran dan masukan yang baik untuk TNI dan industri strategis nasional.
					LSM	Mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengadaan alutsista agar mampu mencapai output dan <i>outcome</i> yang sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT		CONTOH KEGIATAN
					MEDIA	Media cetak, elektronik, dan online	Mengikuti Studi Ekskursi Media untuk menambah wawasan dan sudut pandang pemberitaan dan peliputan sektor pertahanan dan alutsista serta produk dalam negeri, untuk memberikan rasa aman dan bangga bagi masyarakat Indonesia.
KAMTIBMAS							
9b	Konflik Horizontal, Aksi Separatis, dan Aksi Teroris	Ancaman Faktual	Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang terintegrasi dengan pembinaan Teritorial TNI, Pemolisian Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat	1. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; 2. Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan	PEMERINTAH	Kemhan	Menindaklanjuti <i>Joint Statement</i> 6(enam) Menteri Pertahanan ASEAN forum “ <i>Our Eyes</i> ” untuk mendeteksi teroris, termasuk pertukaran informasi dan intelijen.
						BNPT	
						Kemdagri	Menindaklanjuti kebijakan peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan program riil.
						Polri	Mengembangkan pemanfaatan TIK yang banyak digunakan masyarakat sebagai sarana peningkatan program Pemolisian Masyarakat (<i>Community Policing</i>)
						TNI	Pembekalan pengetahuan pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah bagi masyarakat untuk mendukung siskamling guna peningkatan ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat.
						BIN	Meningkatkan keahlian intelijen pada segenap program sekolah kedinasan di berbagai tataran untuk mendukung pembinaan kamtibmas secara lintas sektoral.
						Pemda	Mengaktifkan dan menggelar lomba siskamling bersama Kemdagri, Polri, dan TNI
					DUNIA PENDIDIKAN	Perguruan Tinggi	Melakukan Kuliah Kerja Nyata, merenovasi bangunan dan peralatan pendukung sistem keamanan lingkungan (siskamling)
						Pendidikan menengah	Merevitalisasi gerakan Pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler seperti Patroli Keamanan Sekolah untuk mendukung pembinaan kamtibmas di lingkungan masing-masing.

NO	ANCAMAN	KLASIFIKASI AGHT	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA TERKAIT	CONTOH KEGIATAN
					DUNIA USAHA Perusahaan <i>StartUp</i> informasi dan telekomunikasi	Membuat aplikasi keamanan <i>online</i> antar masyarakat yang dapat diunduh di <i>Google Play Store</i> dan <i>App Store</i> secara gratis.
					KOMPONEN MASYARAKAT Forum Kewaspadaan Masyarakat	Bekerja sama dengan pemda, berkontribusi dalam Kominda menjangkau, menampung, melakukan koordinasi dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat menggunakan sistem keamanan <i>SMS Gateway</i>
					MEDIA Media massa cetak dan online	Meningkatkan kampanye menggiatkan dan membudayakan kembali siskamling di Indonesia

V. PENUTUP

Kelangsungan hidup NKRI menuju terwujudnya cita-cita bangsa akan terjamin dengan kesadaran bela negara yang kuat yang diikuti dengan implementasi bela negara oleh setiap warga negara dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT, serta dalam upaya memperkuat Ketahanan Nasional, baik dalam aspek demografi, geografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi maupun aspek pertahanan keamanan

Modul II Implementasi Bela Negara ini hadir sebagai panduan untuk menjembatani Modul I Konsepsi Bela Negara bagi K/L dan Pemda guna menyusun Modul Khusus dan program aksi sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsi masing-masing K/L, serta Pemda dengan kekhasan daerah masing-masing.

Kemampuan melihat dan memahami perkembangan zaman, serta menganalisis bentuk-bentuk ancaman, baik bentuk nonmiliter maupun militer berikut ancaman faktual dan ancaman potensial sifatnya penting bagi optimalisasi implementasi bela negara yang ruang lingkupnya sangat luas. Oleh karena itu, keberhasilan dari aksi bela negara sebagai suatu gerakan nasional sangat tergantung kepada peran semua pihak untuk ikut serta sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing untuk berbuat yang terbaik di lingkungannya dan area publik dalam rangka upaya bela negara.

